

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam tabel dibawah ini:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%	80%	100%
		2. Persentase (%) dinas siaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR	35%	100%	285%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%	100%	106.38%
		4. Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	85%	100%	117.65%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	82.89%	102.33%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%	83.96%	101.16%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100%	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	0%	0%
2.	Terwujudnya tata kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%

*Note : (6) didapat dari nilai (5) dibagi (4)

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Pada Sasaran Program I “Meningkatnya layanan monitoring pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio” terdapat 8 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor.

Pada tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke merencanakan pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 8 kali di 5 wilayah kota/kabupaten Merauke dengan capaian kinerja 80% dari yang ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2018 sebesar 80%, dari 8 kali kegiatan tersebut telah termonitor okupansi pendudukan 21 pita subservice, pelacakan penggunaan frekuensi ilegal dan pendataan standarisasi perangkat telekomunikasi di 4 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota yang ada di Kota/Kabupaten Merauke. Dengan demikian Indikator Kinerja persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor mencapai target. Namun pelaksanaan monitor okupansi pendudukan 21 pita subservice hanya dapat dilaksanakan di 1 kabupaten dikarenakan tidak tersedianya perangkat monitoring okupansi frekuensi radio bergerak atau jinjing, selain itu kondisi dan sarana transportasi yang sulit untuk menjangkau seluruh wilayah kerja di kabupaten/kota Merauke.

Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR.

Pada tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menyusun rencana program kerja pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sebanyak 10 kali dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2018 sebesar 35% dari 8 ISR yang terdaftar pada data SIMS. Sampai dengan bulan Desember 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melaksanakan pengukuran parameter teknis dengan capaian sebesar 100% dari target 35% yaitu 4 stasiun TV dan 4 stasiun Radio siaran di wilayah Cakupan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke. Dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melebihi dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2018.

Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan.

Pada tahun 2018 pula, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke merencanakan 3 kali kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Kabupaten Merauke dengan target pada perjanjian kinerja 94% aduan/klaim yang diselesaikan, upaya penanganan gangguan frekuensi radio telah dilaksanakan 3 kali kegiatan di tahun 2018 yaitu penanganan gangguan frekuensi radio dari aduan Amatir Radio, BMKG, KMTV Merauke dan telah diselesaikan dengan status ‘clear’, selain itu juga telah dilakukan monitoring terkait potensi gangguan frekuensi di kabupaten Merauke. Sehingga pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sudah melebihi yang ditargetkan yaitu 100%.

Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT.

Tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Merauke telah menandatangani perjanjian kinerja salah satunya 85% kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja UPT, sementara pada program kerja tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke merencanakan program kerja pelaksanaan penertiban penggunaan frekuensi radio sebanyak 2 kegiatan. Dengan target kinerja dan rencana kerja tahun 2018 tersebut maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melaksanakan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dengan target operasi sejumlah 14 pengguna ilegal dimana kesemua pengguna tersebut telah dilakukan penindakan penghentian aktifitas dan penyegelan perangkat. Tindak lanjut hasil penertiban tersebut adalah dengan mengarahkan pengguna untuk segera mengurus izin frekuensi radio, dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke yaitu 100% dari 85% yang ditargetkan.

Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR

Pada daftar perjanjian kinerja tahun 2018 Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menargetkan 81% kesesuaian data hasil inspeksi terhadap 76 data ISR. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke merencanakan kegiatan Inspeksi data sebanyak 9 kali kegiatan. Sampai dengan Desember 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melaksanakan inspeksi sebanyak 12 kali dengan data kesesuaian ISR sebanyak 63 data dari total 76 data ISR, atau dengan kata lain presentase capaian kinerja adalah sebesar 82.89%.

Persentase (%)berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur UPT.

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menargetkan 83% berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT bertujuan untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur tetap kondisi baik dan siap pakai.

Selain perawatan rutin perangkat pendukung SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur Balai Monitor Kelas II Merauke juga melakukan inspeksi rutin perangkat SMFR transportable di dua lokasi yaitu di site Merauke, dan site Boven Digoel. Hingga akhir Desember 2018 perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur sejumlah 187 perangkat dengan status Baik sebanyak 157 perangkat, sementara yang rusak ringan maupun rusak berat sejumlah 30 Perangkat. Dengan demikian Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT mencapai 83,96%. Dimana angka ini melebihi target yang ditetapkan.

Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT

Dalam perjanjian kinerja tahun 2018 Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke juga menargetkan 100% terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung meningkatnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP).sampai dengan posisi Desember 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melaksanakan pendistribusian 46 SPP di wilayah kerja Balmon Merauke. Dengan diberlakukannya sistem perizinan Online saat ini, ISR terbit dalam bentuk digital dan dapat diakses langsung oleh user sehingga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sudah tidak lagi melakukan pendistribusian ISR.

Persentase (%) terlaksananya UNAR

Dalam perjanjian kinerja tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menetapkan target 100% terlaksananya UNAR sementara pada rencana program kerja tahun 2018 Balai Monitor spektrum Frekuensi radio Kelas II Merauke merencanakan 2 kali kegiatan di wilayah Kab/Kota Merauke. Sampai dengan Desember 2018 kegiatan tersebut tidak terlaksana. Hal ini terkendala pada ketaidaksiapan dari Organisasi Lokal setempat.

Pada Sasaran Program II “Terwujudnya tata kelola UPT Monitor spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif” terdapat 2 (dua) indikator kinerja, berikut ringkasan capaian masing-masing indikator.

Pada tahun 2018, dilakukan 2 (dua) kegiatan layanan (yang merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya) pada pelayanan publik Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke. Dua kegiatan layanan tersebut adalah pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio dan layanan administrasi. Hasil dari kegiatan ini digunakan sebagai dasar bagi Balai Monitor Spektrum frekuensi Radio Kelas II Merauke untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran terwujudnya layanan prima terhadap masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke.

Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio

Selain melaksanakan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban dan penanganan gangguan frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke juga melaksanakan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio di wilayah kerja Balmon Merauke. Dalam hal pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selaku instansi yang menangani piutang negara.

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke merencanakan pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio sebanyak 2 kali dan telah dilaksanakan dengan jumlah SPP BHP tertunggak sebanyak 8 Wajib Bayar yang telah diserahkan ke KPKNL. Dengan demikian pencapaian kinerja sebesar 100%.

Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke juga melaksanakan layanan administrasi dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menyusun rencana program kerja tahunan dengan total pagu dalam DIPA Rp. 7.887.970,- yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 3.596.280.000,- dan PNPB sebesar Rp. 4.291.690.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Target
1	Layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika Balai Monitor Merauke	Rp. 1.025.130.000,-	50 Layanan
2	Layanan penyelesaian penanganan gangguan Balai Monitor Merauke	Rp. 62.590.000,-	8 Layanan
3	Dukungan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT. Ditjen SDPPI.	Rp. 1.625.648.000,-	1 Layanan
4	Layanan internal (overhead)	Rp. 359.500.000,-	1 Layanan
5	Layanan perkantoran	Rp. 4.816.102.000,-	12 bulan layanan

b. Ketata usahaan dan Rumah Tangga

Ketata usahaan.

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran Pemerintah Propinsi Papua, Jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Kabupaten Merauke, serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio

- ✓ Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2018 adalah sebanyak 275 surat.

- ✓ Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke selama periode bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebanyak 228 surat dan Surat Perintah Tugas sebanyak 161 surat.

Kerumah Tanggaan.

Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor serta peralatan rumah tangga kantor.

Pengadaan Barang dan Jasa, Dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 4 kontrak.

c. Kepegawaian

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Merauke memiliki sumber daya manusia sejumlah 11 pegawai ASN dan 18 pegawai Non ASN. Pegawai negeri sipil terdiri dari : golongan IV sejumlah 0 pegawai, golongan III sejumlah 8 pegawai dan golongan II sejumlah 3 pegawai. Pada tahun 2018 terdapat 2 pegawai kenaikan pangkat/golongan dan 5 pegawai kenaikan gaji berkala, sedangkan dari segi pendidikan formal pendidikan S1 sejumlah 7 pegawai, D3 sejumlah 3 pegawai, SMK sejumlah 1 pegawai.

d. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke posisi Desember 2018 yang terserap sebesar Rp. 7.007.838.407,- dari pagu Rp. 7.888.970.000,- atau sebesar 88.83 %

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke melakukan revisi DIPA sebanyak 3 kali yaitu revisi administrasi berupa 1 (satu) kali rencana penarikan dana, 1 (satu) belanja barang dan 1 (satu) kali revisi pagu minus.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh,
Shalom,
Om swasiastu,
Namo Buddhaya,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun 2018, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

LKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan seksi Pemantauan dan Penertiban, Seksi Sarana dan Pelayanan serta Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dilingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Melalui LKIP Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian

kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2015- 2019 dan Rencana Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun 2018.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2018. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum, Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Merauke, Januari 2019

KEPALA BALAI MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II
MERAUKE



SIMSON LIHA, SH

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	11
A. LATAR BELAKANG	11
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	12
C. POTENSI DAN PERMSALAHAN STRATEGIS	14
D. SISTEMATIKA LAPORAN	15
BAB II PERJANJIAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. SASARAN PROGRAM	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI, DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO	
1. IK-1 Persentase (%) Kabupaten/Kota yang Dapat Termonitor	20
2. IK-2 Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR	22
3. IK-3 Persentase (%) Jumlah Aduan/Klaim yang Diselesaikan	22
4. IK-4 Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	22
5. IK-5 Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR	23
6. IK-6 Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitor/Ukur di UPT	25
7. IK-7 Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	25

SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF

1. IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio	27
2. IK-2 Persentase (%) Pelaksanaan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai dengan Perencanaan	28
B. KINERJA LAINNYA	33
BAB IV PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas sama seperti sumber daya alam yang ada di tanah dan juga air, kalau tidak dimanfaatkan dengan benar bisa merugikan warga negara. Karena terbatas maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagai mana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 ayat 2 yaitu Sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informatika spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari hari, Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien (tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Merauke dan sekitarnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian negara amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2. Seksi Pemantauan dan Penertiban.

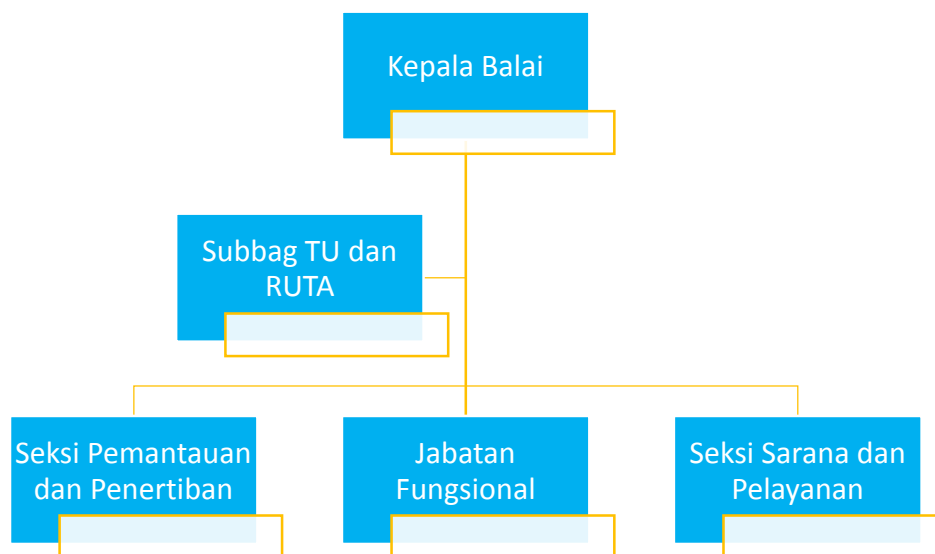
Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, dan penertiban terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.

3. Seksi Sarana dan Pelayanan.

Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, sosialisasi serta pelaksanaan ujian amatir radio.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas II Merauke

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Secara geografis wilayah Merauke berada paling selatan dari Pulau Papua dan merupakan Kabupaten terluas sekaligus paling timur di Indonesia, dengan luas wilayah 44.071 km². Seiring dengan itu pembangunan infrastruktur telekomunikasi mengalami pertumbuhan begitu pesat yang sebarannya tidak tertumpu pada kota Merauke saja, namun juga mulai menyebar di 4 kabupaten lainnya di Wilayah Merauke seperti pembangunan Transportable, layanan internet dan akses jaringan telekomunikasi. Begitu pula dengan pengguna spektrum frekuensi radio mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti penyelenggara broadcasting, radio konsesi, operator seluler dan penyelenggara TV Kabel. dan jumlah pengguna spektrum frekuensi radio yang berizin (ber ISR) berjumlah 2.997 ISR. Berdasarkan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tugas dan fungsi Balmon Kelas II Merauke disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut Balmon Kelas II Merauke dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat pada Balmon Kelas II Merauke yang memiliki kompetensi teknis sudah mumpuni, tapi saat ini masih diperbantukan di Subbag tata Usaha dan Rumah Tangga sehingga dipandang perlu penambahan personil bidang administrasi dan keuangan yang notabene tepat sasaran penempatan nya di Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, serta peningkatan bimtek dan *capacity building*.
- b. Anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan (*capacity Building*) di bidang teknis perlu ditingkatkan.
- c. Regulasi penggunaan spektrum yang belum komprehensif belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia, sehingga implementasi regulasi spektrum yang belum optimal, hal ini dibutuhkan sosialisai yang intensif yang tepat sasaran dan tepat guna.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke meliputi :

- a. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
- d. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2015-2019 yang disusun oleh Direktorat Jenderal SDPPI, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas.

B. SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada periode 2015 – 2019 yang telah disusun adalah sasaran Program yang akan dicapai.

C. PERJANJIAN KINERJA 2018

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2018 dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat di monitor.	80%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio/TV) yang terukur sesuai dengan ISR.	35%

	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio		
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan.	94%
		4. Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	85%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur UPT	83%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%
2	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang Bersih, Efisien dan Efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 7.888.970.000,- sebelum revisi yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2018 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat di monitor.	80%	80%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio/TV) yang terukur sesuai dengan ISR.	35%	100%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan.	94%	100%
		4. Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	85%	100%
			81%	55.22%

		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR		
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur UPT	83%	83.96%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	0%
2	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang Bersih, Efisien dan Efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%



Foto 3.1 Monitoring Spektrum Radio Pengguna

SASARAN 1.**MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO****1. IK-1 Persentase (%) Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor.**

Indikator Kinerja Persentase (%) Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor memiliki target sebesar 80%. Pada tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke merencanakan pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 8 kali di 5 (lima) wilayah Kabupaten/Kota Merauke. Dari rencana 8 kali kegiatan, terlaksana sebanyak 11 kali kegiatan yang terdiri dari kegiatan monitoring okupansi 21 pita frekuensi dan monitoring identifikasi pengguna frekuensi radio dengan capaian target kinerja sebesar 80% dari target 80%.

Pada wilayah kerja Kabupaten Merauke hanya dapat dilakukan monitoring okupansi di 1 kabupaten saja (Merauke) sedangkan di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Mappi tidak dilakukan monitoring okupansi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan perangkat monitoring bergerak atau jinjing yang mendukung fungsi monitoring okupansi yang dimiliki kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke.

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja “Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor” yang ditargetkan mencapai 80% secara akumulasi sampai dengan Desember 2018 telah tercapai 80% sedangkan target indikator kinerja yaitu 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kerja yaitu 100%.

2. IK-2 Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR.

Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR memiliki target sebesar 35%. Sepanjang tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melaksanakan pengukuran parameter teknis spektrum frekuensi radio di wilayah Kab/Kota Merauke sejumlah 8 stasiun dari 8 stasiun yang sesuai ISR. Dengan demikian Indikator Kinerja Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai ISR telah melebihi target yaitu 100% dari 35% yang ditargetkan.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	100%	285%

Dari capaian indikator kinerja persentase (%) stasiun radio siaran (radio dan TV) yang telah dilaksanakan dapat kami rincikan sebagai berikut :

No	Wilayah Kab/Kota	Jumlah ISR Broadcasting	Jumlah ISR Broadcasting Terukur		Persentase
			Radio Siaran FM	TV	
1	2	3	4	5	6
1	Kab. Merauke	7	3	4	100%
2	Kab. Boven Digoel	1	1	0	100%
Total ISR Terukur		8	4	4	100%

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah stasiun radio (radio siaran dan TV) yang terukur sejumlah 8 stasiun dari 5 kabupaten/kota di wilayah Kab. Kota Merauke.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator “Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR” telah menyelesaikan 100% dari target 35%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai melebihi target yaitu 285%.

3. IK-3 Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan.

Indikator Kinerja Prosentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan memiliki target realisasi sebesar 94 %. Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke mendapat aduan/klaim dari masyarakat pengguna frekuensi ilegal sejumlah 3 aduan, dari 3 aduan tersebut telah tertangani dengan hasil clear.

Berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa nilai dari hasil rumusan kedua Indikator dimaksud sebesar 100% sedangkan target adalah 94% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 106.38%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%)Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%	100%	106.38%

NO	BULAN	KEGIATAN	HASIL
1	Maret	Penanganan Gangguan Frekuensi ORARI	- Organisasi Radio Amatir Lokal Merauke (ORARI) melaporkan adanya gangguan penggunaan frekuensi 145.725 MHz secara kontinyu - Dilakukan monitoring dan mendeteksi sumber pancaran frekuensi pengganggu. Ditemukanali frekuensi pengganggu 147,250 MHz Berasal dari salah satu channel tv kabel. Setelah itu dilakukan penindakan terhadap sumber pancaran tersebut yaitu dengan mematikan perangkat (modulator) channel dengan frekuensi 147,250MHz. - Status Clear

2	Juni	Penanganan Gangguan Radar BMKG	- Ditemukenali 2 Frekuensi pengganggu pada pita 5.6 GHz. Kedua frekuensi pengganggu tersebut digunakan oleh PT.AMS - Telah dilakukan relokasi ke pita 5.8 GHz - Status Clear
3	September	Penanganan Gangguan KM TV Merauke	- PT. Televisi Merauke Top Bersatu (KMTV) Melaporkan adanya gangguan pada Frekuensi 543,250 MHz (Kanal 30 UHF) - Dilakukan monitoring dan mendeteksi sumber pancaran frekuensi pengganggu.namunTidak ditemukenali adanya gangguan atau interferensi pada Frekuensi Tersebut. Daya Pancar pada Stasiun tersebut sangat kecil sehingga jangkauan siarannya terbatas. - Tidak ditemukenali adanya gangguan - Status Clear

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa penanganan aduan/klaim gangguan spektrum frekuensi radio yang masuk sejumlah 3 aduan/klaim telah ditangani dengan hasil clear.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator “Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan” telah diselesaikan 100% dari target 94%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai yaitu 106.38%.

4. IK-4 Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilaya Kerja UPT.

Indikator Kinerja persentase (%) kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah kerja UPT memiliki target 85%, Sepanjang tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melaksanakan penertiban spektrum frekuensi radio sejumlah 2 kali di wilayah Kab/Kota Merauke yaitu di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melaksanakan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dengan target operasi sejumlah 14 pengguna ilegal dimana kesemuanya telah dilaksanakan penertiban dengan menghentikan aktifitas dan penyegelan perangkat. Tindak lanjut hasil penertiban dengan mengarahkan pengguna untuk segera mengurus izin spektrum frekuensi radio, dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke yaitu 100% dari 85% yang ditargetkan.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	85%	100%	117.65%

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator “Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT” telah diselesaikan 100% dari target 85%, sehingga dapat disimpulkan capaian indikator kerja hanya sebesar 117.65%.

5. IK-5 Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR.

Indikator Kinerja Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR memiliki target realisasi sebesar 81 persen, Sepanjang tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melaksanakan inspeksi data frekuensi radio sejumlah 12 kali di wilayah Kab/Kota Merauke dengan hasil yang diperoleh sejumlah 63 data dari 76 jumlah data yang ditargetkan pada tahun 2018, dengan demikian Indikator Kinerja persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR tercapai sebesar 82.89% dari 81% yang ditargetkan.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	82.89%	102.33%

Data teknis hasil validasi

Operator per Kabupaten	Hasil Validasi Data							Hasil Tindak Lanjut Validasi Data (Coklit)							Keterangan
	Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR	Tidak Ada ISR	Ada ISR, tidak ada di SIMS UPT terkait (Sesuai ISR)	Ada ISR, tidak ada di SIMS UPT terkait (Tidak Sesuai ISR)	Off Air	Habis Masa Laku	Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR	Tidak Ada ISR	Ada ISR, tidak ada di SIMS UPT terkait (Sesuai ISR)	Ada ISR, tidak ada di SIMS UPT terkait (Tidak Sesuai ISR)	Off Air	Habis Masa Laku	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	I	II	III	IV	V	VI	VII	
PT. Telkomsel, Tbk (8071)															
1 Kab. Merauke,Dalam Kota	2	0	0	0	0	5	1	2	0	0	0	0	5	1	
2 Kab. Merauke, Luar Kota	9	0	0	0	0	5	0	9	0	0	0	0	5	0	
3 Kab. Asmat	4	0	3	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	
4 Kab. Yahukimo	2	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0	2	0	
Jumlah	35							35							
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT - RADIO BACKHAUL (00105553)															
1 Kab. Merauke,Dalam Kota	13	0	0	0	0	2	0	13	0	0	0	0	2	0	
2 Kab. Merauke, Luar Kota	11	0	0	0	0	2	0	11	0	0	0	0	2	0	
Jumlah	28							28							

Data administrasi hasil validasi

Operator per Kabupaten		Hasil Validasi Data						Hasil Tindak Lanjut Validasi Data						Keterangan
		Stasiun dengan Alamat dan Koordinat sesuai ISR	Stasiun dengan Alamat tidak sesuai ISR	Stasiun dengan Koordinat tidak sesuai ISR	Stasiun dengan Alamat dan Koordinat tidak sesuai ISR	Tidak ada ISR	Off Air	Stasiun dengan Alamat dan Koordinat sesuai ISR	Stasiun dengan Alamat tidak sesuai ISR	Stasiun dengan Koordinat tidak sesuai ISR	Stasiun dengan Alamat dan Koordinat tidak sesuai ISR	Tidak ada ISR	Off Air	
PT. Telkomsel, Tbk (8071)														
1	Kab. Merauke,Dalam Kota	3	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	5	
2	Kab. Merauke, Luar Kota	3	0	6	0	0	5	3	0	6	0	0	5	
3	Kab. Asmat	1	2	1	0	3	0	1	2	1	0	3	0	
4	Kab. Yahukimo	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	2	
Jumlah		35						35						
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT - RADIO BACKHAUL (00105553)														
1	Kab. Merauke,Dalam Kota	1	12	0	0	0	2	1	12	0	0	0	2	
2	Kab. Merauke, Luar Kota	3	9	0	0	0	1	3	9	0	0	0	1	
Jumlah		28						28						

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Inspeksi data spektrum frekuensi radio di wilayah Merauke sejumlah 12 kali kegiatan dengan hasil 63 radio link terdiri dari 53 legal, 0 ilegal dan 10 tidak sesuai ISR, sedangkan sample yang ditargetkan adalah 76 ISR atau 81%.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator “Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR” telah diselesaikan 82.89% dari target 81%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil yang dicapai melebihi dari target yaitu 102.33%.

6. IK-6 Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT.

Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur memiliki target realisasi sebesar 83% . Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2018 sebesar 83.96%, sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 101.16%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	83%	83.96%	101.16 %

7. IK-7 Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT.

Indikator Kinerja Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT memiliki target realisasi sebesar 100 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2018 sebesar 100% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan /ISR oleh UPT	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Pendistribusian SPP BHP Frekuensi Radio

NO	BULAN	BARU	PERPANJANGA N	ST1	ST2	ST3	ST4	JUMLAH
1	JANUARI	3	19	5	0	4	4	35
2	FEBRUARI	5	19	6	2	0	2	34
3	MARET	8	15	3	3	0	0	29
4	APRIL	4	32	5	2	2	0	45
5	MEI	2	19	13	3	1	1	39
6	JUNI	1	15	8	2	3	0	29
7	JULI	0	23	8	8	1	3	43
8	AGUSTUS	2	28	9	4	4	1	48
9	SEPTEMBER	1	18	4	7	4	1	35
10	OKTOBER	1	29	14	4	5	4	57
11	NOVEMBER							0
12	DESEMBER							0



Pengukuran Coverage Area

SASARAN 2.**TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF.**

Sebagai upaya mendukung peningkatan pada pelayanan publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika Ditjen SDPPI, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke melakukan kegiatan berupa :

- ✓ Kegiatan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio.
- ✓ Kegiatan layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

1. IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio.

Indikator Kinerja Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio memiliki target sebesar 100 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2018 adalah sebesar 100%, sehingga presentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efektif dan efisien	Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

No	Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah Wajib Bayar	Hasil	Keterangan
1	April	Merauke	1	Terbayar : 1	
2	Mei	Merauke	1	Terbayar : 1	
3	Juni	Merauke	2	Terbayar : 2	
4	Juli	Merauke	1	Terbayar : 1	
5	Agustus	Merauke	1	Terbayar : 1	

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio telah terlaksana sesuai target yang di tetapkan 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

2. IK-2 Persentase (%) Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan memiliki target sebesar 100 persen. Berdasarkan hasil kegiatan diketahui bahwa telah dilaksanakan semua kegiatan yang direncanakan ditahun 2018 sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang efektif, efisien dan efektif	Persentase (%) Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio di wilayah Merauke yang merupakan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, maka dibutuhkan layanan administrasi sehingga tercapai target yang telah direncanakan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dalam melaksanakan layanan administrasi yang sesuai perencanaan terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari :

- a. Perencanaan dan program
- b. Penatausahaan dan rumah tangga
- c. Kepegawaian
- d. Pelaksanaan anggaran
- e. Perencanaan dan Program

- a. Perencanaan dan Program

Pada tahun 2018 jumlah anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sebesar Rp. 7.887.970.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNPB. Adapun rincian program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah :

No	Kode Output	Uraian	Volume	Pagu
1	2	3	4	5
1.	031	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika, terdiri dari :	32 kegiatan	Rp. 1.025.130.000
		1. Observasi dan Monitoring bergerak frekuensi radio	8 kegiatan	Rp. 188.570.000
		2. Operasi Penertiban Frekuensi Radio	2 kegiatan	Rp. 148.370.000
		3. Validasi Data Frekuensi Radio	9 kegiatan	Rp. 276.530.000
		4. Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio	10 kegiatan	Rp. 279.100.000
		5. Ujian Negara amatir Radio	2 kegiatan	Rp. 132.560.000
2.	068	Penyelesaian Peanganan Gangguan Frekuensi Radio Balai Monitor, terdiri dari :		Rp. 62.590.000
		1. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	2 kegiatan	Rp. 15.540.000

		2. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Kegiatan	Rp. 47.050.000
3.	078	Dukungan Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di UPT Ditjen SDPPI, terdiri dari :		Rp. 1.625.648.000
		1. Standar Biaya Masukan Lainnya	1 Layanan	Rp. 436.200.000
		2. Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi		Rp. 730.668.000
		3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Rp. 298.130.000
		4. Peningkatan Sarana dan Prasana Pengawasan		Rp. 160.630.000
4.	951	Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	Rp. 359.500.000
		1. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Rp. 214.000.000
		2. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		Rp. 145.500.000
5.	994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	Rp. 4.816.102.000
		1. Gaji dan Tunjangan		Rp. 1.546.700.000
		2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Rp. 3.269.402.000

b. Ketatausahaan dan Rumah Tangga

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan Jajaran Instansi, serta para penyelenggara / pengguna spektrum frekuensi radio diwilayah kota/kabupaten Merauke.

- ✓ Surat Masuk selama periode Januari sampai dengan Desember 2018 adalah sebanyak 275 surat;
- ✓ Surat Keluar selama periode Januari sampai dengan Desember 2018 adalah sebanyak 228 surat;
- ✓ Surat Tugas sebanyak 161 surat.

Kerumahtanggaan selama tahun 2018 meliputi pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor, pemeliharaan perangkat pendukung monitoring serta peralatan rumah tangga kantor.

Dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Sewa Lahan Transportable	12 bulan	01/KOMINFO/BALMON.92/KU.01.04/01/2018	63.888.000
2.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 paket	90/KOMINFO/BALMON.92/PL.02.03/07/2018	209.987.900
3.	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	1 paket	122/PM/CCTV-AC/MR/05/2018	49.337.000
4.	Pengadaan Langganan Internet Transportable	12 bulan	K.Tel.145/HK.810/WTL-7D100000/2018	40.392.000
5.	Pengadaan Langganan Internet 6 Mbps	12 bulan	K.Tel.216/HK.810/WTL-7D100000/2018	22.932.250

c. Kepegawaian

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke memiliki Sumber Daya Manusia sejumlah 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 20 pegawai kontrak.

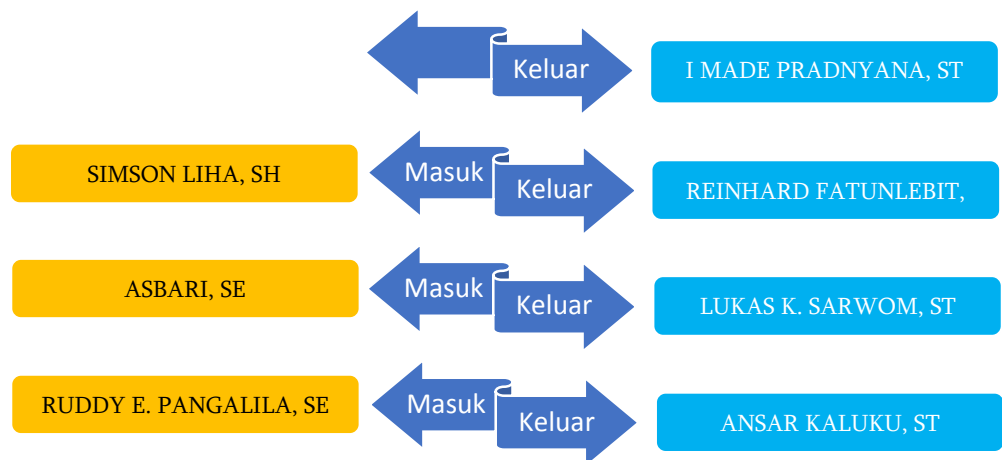
Daftar Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2018

No	NAMA/NIP	Gol/Ruang	Masa Kerja
1	2	3	4
1.	REINHARD FATUNLEBIT, ST NIP. 196603121986031005	Penata Tk. I/III.D	32 Tahun 00 Bulan
2.	MARTHIN PANGEMANAN, S.Sos, ST NIP. 196103251987031003	Penata Tk. I/III.D	31 Tahun 00 Bulan
3.	ANSAR KALUKU, ST NIP. 196607261990031003	Penata Tk. I/III.D	28 Tahun 00 Bulan
4.	LUKAS K. SARWOM NIP. 196903151989031004	Penata Tk. I/III.D	29 Tahun 00 Bulan
5.	PETRUS SARJU NIP. 196803261990031004	Penata Muda Tk. I/III.B	28 Tahun 00 Bulan
6.	MUHTADI, SE NIP. 197805052005021003	Penata Muda Tk. I/III.B	13 Tahun 00 Bulan

No	NAMA/NIP	Gol/Ruang	Masa Kerja
1	2	3	4
7.	I MADE PRADNYANA, ST NIP. 198501292009121002	Penata Muda Tk. I/III.B	9 Tahun 00 Bulan
8.	AGUSTINUS ZENDRATO, S.Sos NIP. 196808171989031006	Penata Muda/III.A	29 Tahun 00 Bulan
9.	SYAMSUL BAHRI, A.Md NIP. 198405102008031002	Penata Muda/III.A	10 Tahun 00 Bulan
10.	PANUNTUN WIBOWO, A.Md NIP. 198611212015041001	Pengatur/II.C	03 Tahun 00 Bulan
11.	ANDI NURHIKMAH ALI, A.Md NIP. 199111022015042001	Pengatur/II.C	03 Tahun 00 Bulan
12.	RULANDY THOMAS NIP. 198712112008031001	Pengatur Muda Tk.I/II.B	10 Tahun 00 Bulan

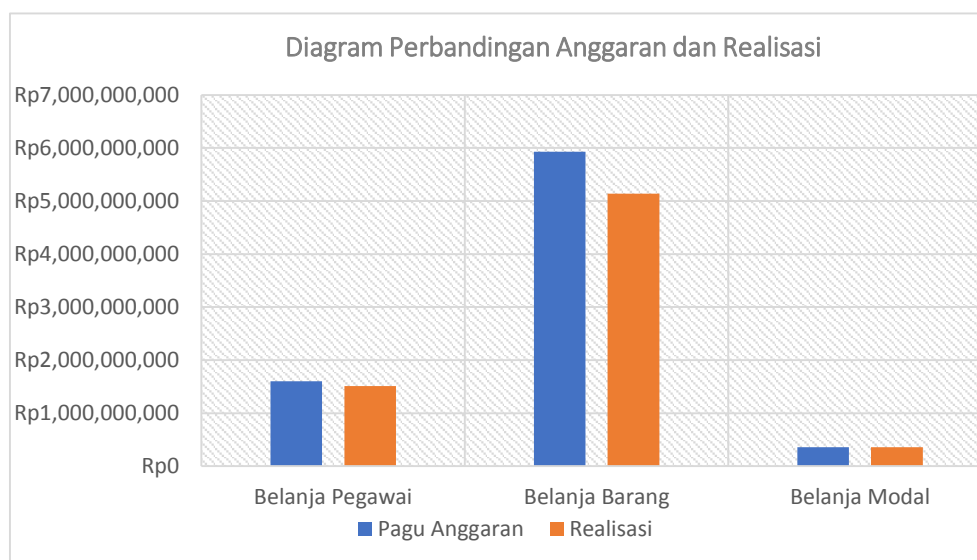
➤ Mutasi / Rotasi Aparatur Sipil Negara

Pada bulan Agustus dan September Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke terdapat mutasi beberapa pegawai, diantaranya :



d. Pelaksanaan Anggaran

Pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun Anggaran 2018 sesuai DIPA No. 059.03.2.654205/2018 tanggal 26 Nopember 2018 adalah sebesar Rp. 7.887.970,- sedangkan realisasi adalah sebesar Rp. 7.007.838.407,- atau 88,83%.



BAB IV PENUTUP

Tahun 2018 ini, sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas II Merauke selaku unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio serta mengawasi perangkat pos dan informatika yang digunakan maupun yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan layanan telekomunikasi utamanya telekomunikasi berbasis spektrum frekuensi radio (nirkabel) yang dewasa ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan Ditjen SDPPI.

Berdasarkan pentapan Indikator Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, telah ditetapkan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yang mendukung 2 (dua) Sasaran Program Ditjen SDPPI. Dari hasil Analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peranan dan penilaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke. Pada LKIP ini sudah menggunakan Indikator Kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap LKIP ini.